



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 dan merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program masing-masing.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya..

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar



Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing bidang dan standar pelayanan publik (SPP)
5. Pengkoordinasian dan penyusunan perubahan rencana strategis (renstra), rencana kerja (RENJA) dan rencana kinerja tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
13. Fasilitasi penyusunan penetapan kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

- penyelenggaraan tugas dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.;
 22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 23. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 24. Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 26. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
 27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup diantaranya kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal, luasan Ruang Terbuka Hijau publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah, meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca, nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan, dan juga isu regulasi lingkungan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dari 2 tujuan dan 2 sasaran. Untuk tujuan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Sedangkan untuk sasaran yaitu meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau, dan meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Dari 2 tujuan dan 2 sasaran tersebut, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran serta tingkat efisiensinya, yang mana pada tahun 2025 tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran belum seluruhnya efisien, karena terdapat empat indikator yang memiliki rasio kurang dari 1, dengan rincian sebagai berikut : pencapaian indikator Indeks kualitas air ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 104,54% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,42% dan dikategorikan EFISIEN. Indeks kualitas udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,87 yang berarti untuk pencapaian target

kinerja sebesar 85,95% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,77% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Indeks kualitas lahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,89 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 82,67% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,38% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Persentase capaian layanan persampahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar dibutuhkan realisasi anggaran sebesar dan dikategorikan. Indikator Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,86 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 84,85% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,42% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,77% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase RTH yang dikelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,10 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,38% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase sampah dikelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar dibutuhkan realisasi anggaran sebesar dan dikategorika. Indikator Untuk pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dikelola dengan baik ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,75% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,83% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Serta pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,00 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 97,45% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 97,51% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN..

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

EXECUTIVE SUMMARY iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1

 C. Maksud dan Tujuan 6

 D. Dasar Hukum 6

 E. Aspek – Aspek Strategis 8

 F. Isu – Isu Strategis 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 11

 A. Rencana Strategis 11

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 16

 C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

 A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 21

 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi tahun 2025..... 22

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 – 2025..... 39

 3. Perbandingan realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra..... 41

 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Realisasi Kabupaten/Kota 42

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) 43

 1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran 43

 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 44

 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 60

 C. Prestasi / Penghargaan 62

BAB IV PENUTUP 64

 A. Kesimpulan 64

 B. Langkah Perbaikan 65

Lampiran-Lampiran :

- 1. Matriks Renstra Perubahan 2021-2026
- 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025
- 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- 4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Penyusunan LKjIP menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai di akhir masa jabatan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing bidang dan standar pelayanan publik (SPP)
5. Pengkoordinasian dan penyusunan perubahan rencana strategis (renstra), rencana kerja (RENJA) dan rencana kinerja tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
13. Fasilitasi penyusunan penetapan kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.;
22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

23. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
24. Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
26. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh subbagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

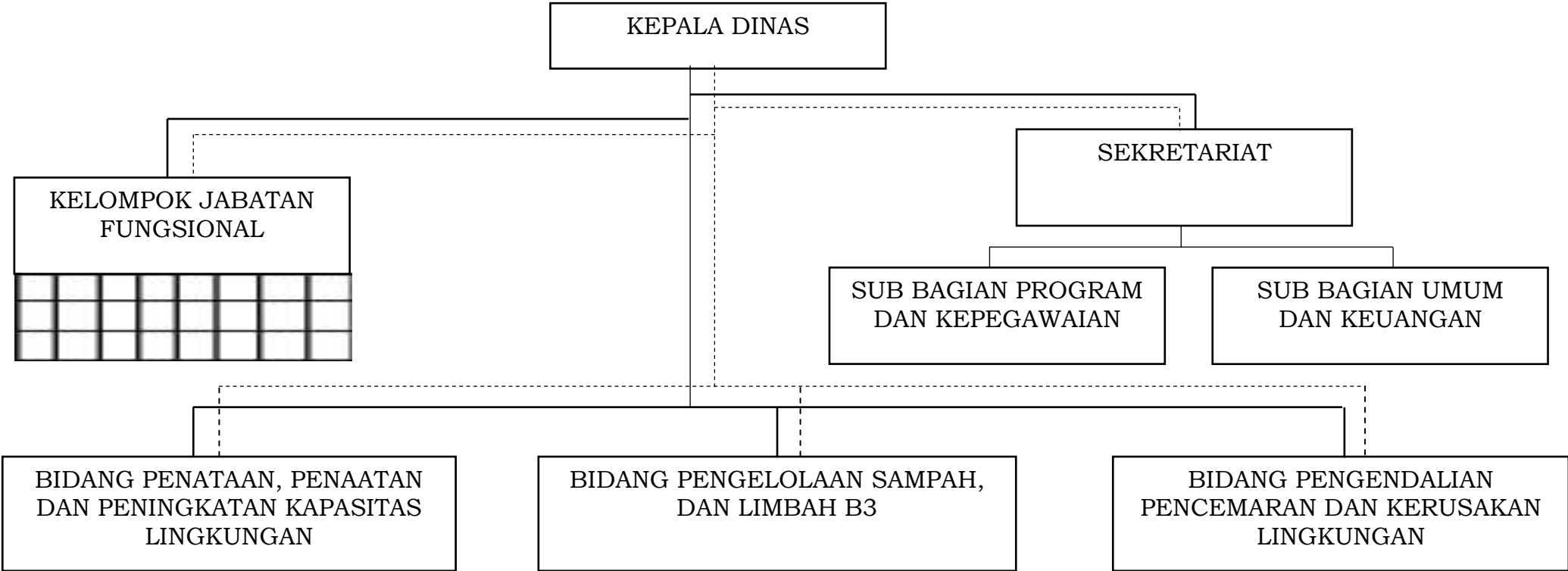
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan atau disingkat dengan P3KL, yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Tata Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKJIP adalah implementasi rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan tujuan dari penyusunan LKJIP adalah :

1. Mendorong OPD untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kinerja OPD akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap DLH.
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik
6. Serta sebagai media untuk mengukur akuntabilitas keuangan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2025 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup ;
- 2). Adanya dukungan Sarana dan Prasarana operasional pengelolaan lingkungan dan persampahan;
- 3). Jumlah personel cukup memadai;
- 4). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas lingkungan hidup ;
- 5). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
- 6). Terjalinnya sistem koordinasi baik internal maupaun eksternal yang harmonis;
- 7). Kondisi geografis terutama kemiringan tanah yang memungkinkan limbah cair dari rumah tangga dan industri diolah pada suatu instalasi pengolahan limbah;
- 8). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya; dan
- 9). Keberadaan Sumber Daya Air terutama air permukaan, relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi.

b. Kelemahan

- 1). Belum lengkapnya uraian tugas pokok dan fungsi bagi pejabat fungsional mengakibatkan potensi tumpang tindih peran atau adanya area tugas yang tidak

tergarap secara maksimal;

- 2). Masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional (Pengawas, Penyuluh, dan Pengendali Dampak Lingkungan) tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah serta jumlah pelaku usaha/industri yang harus dipantau;
- 3). sistem integrasi data lingkungan hidup (seperti data kualitas air, udara, dan persampahan secara *real-time*) masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat;
- 4). Memiliki sarana operasional yang memadai menuntut beban biaya pemeliharaan (*maintenance*) yang tinggi, yang jika tidak dikelola dengan sistem manajemen aset yang ketat, dapat menurunkan performa layanan di masa depan; dan
- 5). Ketergantungan pada metode konvensional dalam pengolahan limbah cair dan sampah, sementara tantangan volume limbah terus meningkat seiring pertumbuhan kota.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Terjalannya *networking* yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- 2). Masyarakat Kota Blitar yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;
- 3). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- 4). Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

b. Kendala

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.
- 2) Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro/pedagang kaki lima yang seringkali sulit terjangkau oleh sistem pengawasan limbah resmi, sehingga berpotensi mencemari saluran drainase kota.
- 3) Meningkatnya pembangunan pemukiman mengurangi daerah resapan air, yang jika tidak diimbangi dengan sumur resapan/biopori di level rumah tangga, akan membebani siklus hidrologi lokal.
- 4) Peningkatan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan sampah B3 rumah tangga yang volumenya terus meningkat, melampaui kecepatan kapasitas edukasi lingkungan ke masyarakat.
- 5) Perubahan kebijakan di tingkat nasional menuntut penyesuaian regulasi daerah yang cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penegakan aturan lingkungan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Terutama dari sisi pengurangan sampah dari sumbernya hingga dicapai kondisi *zero waste*. Hal ini dikarenakan antara lain :
 - ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
 - ✓ Penanganan TPA yang belum efektif, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan TPA.
 - ✓ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat.
 - ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah. Sedangkan kondisi saat ini di Kota Blitar, RTH publik masih berkisar 16,27%, termasuk Kota Blitar belum memiliki hutan kota. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai peresapan air juga mampu mereduksi emisi dari kendaraan maupun industri.
3. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca ini salah satu pemicu utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bersama seluruh sektor untuk dapat menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi seperti yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah.
4. Nilai IKLH sudah memenuhi target, namun nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan masih di bawah target. Nilai Indeks Kualitas Udara tidak dapat memenuhi target dikarenakan Saat perhitungan target menggunakan data empiris Kota yang sudah memiliki alat AQMS, sementara capaian 2025 dihitung menggunakan data satelit atas wilayah Kota. Sedangkan belum terpenuhinya Indeks Kualitas Lahan dari target dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
5. Isu regulasi lingkungan
Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakanyang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan Penyusunan perubahan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR, BERMARTABAT”**. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD

RPJMD 2021-2026	RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
VISI	TUJUAN
Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR, BERMARTABAT	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI 4	SASARAN
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau
TUJUAN	Indikator :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
	2. Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)
	3. Persentase RTH yang terkelola
	4. Capaian layanan persampahan perkotaan
	5. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik
	6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
SASARAN	
1. Meningkatnya kualitas air	
2. Meningkatnya kualitas udara	
3. Meningkatnya kualitas lahan	
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	
	PROGRAM
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	10. Program Pengelolaan Persampahan

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara.
4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH.
5. Optimalisasi pengelolaan sampah.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3.

Kebijakan

1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

I. Tujuan & Sasaran Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas air	1 Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
		2	Indeks kualitas udara		2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)
		3	Indeks kualitas lahan		3	Persentase RTH yang terkelola
		4	Persentase capaian layanan persampahan		4	Capaian layanan persampahan perkotaan
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2 Meningkatnya kinerja perangkat daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
	4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)
			Jumlah predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)
	6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	Persentase pelaku usaha yang memiliki

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
			penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas lingkungan hidup Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan tujuan selama Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas lingkungan hidup selama Tahun 2025 dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78
		Indeks kualitas udara	87,38
		Indeks kualitas lahan	56,73
		Persentase capaian layanan persampahan	97,79
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	91,67
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100
		Persentase RTH yang terkelola	100
		Persentase sampah terkelola	98,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.184.845,67	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	385.233.600	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.662.708.759,33	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.890.000	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	296.475.400	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	305.964.200	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000	Dana Bagi Hasil (DBH)
Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)
TOTAL	22.534.882.353	

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKjIP TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan	Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan	v		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	kualitas air sungai	diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.	Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
		Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.	- Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	v		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR	Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	v		
		Pengadaan alat uji emisi transportasi.	- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	v		
	Pengadaan alat uji emisi transportasi.	Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin.	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	v		
	Perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi)	Perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi)	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kot a - Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	v		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	Meningkatnya jumlah timbunan sampah tiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang.	Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.	- Program Pengelolaan Persampahan - Kegiatan Pengelolaan Sampah - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kota	v		
		Pembentukan kampung Zero Waste.	- Program Pengelolaan Persampahan - Kegiatan Pengelolaan Sampah - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	v		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Hasil pengukuran kinerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78	70,86	104,54%	Sangat Berhasil
		Indeks kualitas udara	87,38	75,10	85,95%	Berhasil
		Indeks kualitas lahan	56,73	46,90	82,67%	Berhasil
		Persentase capaian layanan persampahan	97,79	98,06	100,28%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	91,67	77,78	84,85%	Berhasil
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	100	100,00%	Sangat Berhasil

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
		Persentase RTH yang terkelola	100	100	100,00%	Sangat Berhasil
		Persentase sampah terkelola	98,00	98,06	100,06%	Sangat Berhasil
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00	75,56	100,75%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00	85,81	97,51%	Sangat Berhasil
Rata - Rata capaian target					95,66%	

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Blitar selama tahun 2025 termasuk kategori **SANGAT BERHASIL** dengan nilai capaian kinerja **95,66%**.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menetapkan 1 (satu) Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2025.Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator :

1. Indeks kualitas air

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Indeks kualitas air	Kalkulator Indeks Kualitas Air	67,78	70,86	104,54%

Analisis :

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai angka 70,86. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,78 (dengan tingkat pencapaian 104,54%), tetapi juga mencatatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini

menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran air dan perbaikan kualitas lingkungan hidup mulai menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan. Keberhasilan peningkatan capaian IKA pada tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong utama, antara lain:

- **Peningkatan Frekuensi dan Akurasi Pemantauan:** Dilakukannya uji kualitas air secara rutin di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan memberikan data yang lebih komprehensif dan akurat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi kualitas air secara real-time dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
- **Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Preventif:** Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih bersifat reaktif, pada tahun 2025 pendekatan preventif melalui pembinaan yang rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah menjadi kunci. Pembinaan ini meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan sebelum pencemaran meluas. **Tren Perbaikan Status Mutu Air :** Data pemantauan menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada status mutu air. Dari total 36 kali uji (18 titik x 2 kali pemantauan), sebanyak 14 titik memenuhi baku mutu. Meskipun masih ditemukan 19 titik dengan status cemar ringan dan 3 titik cemar sedang, tidak adanya titik dengan status cemar berat merupakan indikator utama keberhasilan intervensi yang dilakukan. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang masih mencatatkan adanya titik dengan pencemaran berat.
- **Kendala yang Dihadapi :** Meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat permasalahan struktural yang perlu menjadi perhatian serius. Keberadaan titik-titik dengan status cemar ringan dan sedang mengindikasikan bahwa tekanan pencemaran masih berlangsung. Permasalahan utama yang dihadapi adalah : Multisektor Sumber Pencemar: Pencemaran air sungai masih bersumber dari berbagai sektor yang belum terkelola secara terintegrasi, antara lain limbah industri yang belum sepenuhnya mematuhi standar, limbah peternakan yang belum diolah dengan baik, serta kontribusi signifikan dari limbah domestik rumah tangga yang masih banyak dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan.
- **Rencana Tindak Lanjut :** Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di atas target, serta mengatasi permasalahan yang ada, strategi yang diterapkan pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan kolaborasi dan penegakan hukum/preventif yang lebih terukur :
 - **Penguatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi (Monev) Sektoral:** Strategi utama adalah melakukan pembinaan dan monev secara

intensif dan terarah kepada pelaku usaha industri dan peternak yang terindikasi sebagai kontributor pencemaran. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, dengan memberikan pendampingan teknis mengenai pengelolaan air limbah yang sesuai dengan baku mutu.

- Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah (OPD): Menyadari bahwa pencemaran domestik merupakan salah satu sumber utama, strategi koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan limbah domestik menjadi prioritas. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program, seperti percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi terpusat (SPALD) atau penguatan sistem pengelolaan air limbah setempat (tangki septik komunal) di kawasan permukiman padat yang berada di sepanjang DAS.
- Pengendalian Berbasis Lokasi : Dengan data yang menunjukkan 19 titik cemar ringan dan 3 titik cemar sedang, strategi tahun 2025 difokuskan untuk menurunkan status cemar ringan, serta mencegah peningkatan status cemar sedang menjadi berat. Hal ini dilakukan dengan menelusuri sumber beban pencemar di masing-masing titik lokasi secara spesifik.

2. Indeks kualitas udara

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Indeks kualitasUdara	Kalkulator			
	Indeks Kualitas Udara	87,38	75,10	85,95%

Analisis :

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Udara adalah 75,10 atau sebesar 85,95% dari target 87,38. Perhitungan Indeks Kualitas Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara. Saat perhitungan target 2025, metode yang digunakan adalah menggunakan data empiris kota yang sudah memiliki alat AQMS, sementara capaian 2025 dihitung menggunakan data satelit atas wilayah kota. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Pencapaian

Indeks Kualitas Udara tidak terlepas dari faktor pendorong utama, yaitu pelaksanaan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster. Kegiatan ini berkontribusi langsung dalam menyerap polutan, meningkatkan daya dukung lingkungan, serta menekan konsentrasi pencemar udara di wilayah perkotaan. Sinergi antara pendekatan berbasis alam ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kualitas udara di empat sektor strategis seperti perkantoran, industri, perumahan, dan transportasi yang menjadi lokasi pemantauan dengan frekuensi dua kali dalam setahun.

- **Kendala yang Dihadapi :**

- Keterbatasan Pengendalian Emisi Kendaraan: Belum adanya sistem monitoring yang komprehensif terhadap emisi dari kendaraan yang tidak melalui uji KIR (Kendaraan Bermotor Wajib Uji). Hal ini menyebabkan kontribusi sektor transportasi terhadap penurunan kualitas udara masih sulit dikendalikan secara akurat.
- Ketidakselarasan Metode Pengukuran: Terdapat perbedaan metode antara perhitungan target dan capaian. Target tahun 2025 dihitung menggunakan data empiris dari kota yang telah memiliki alat Air Quality Monitoring System (AQMS), sementara capaian dihitung menggunakan data satelit. Perbedaan basis data ini berpotensi menimbulkan bias dalam mengevaluasi kinerja riil di tingkat lokal, mengingat data satelit memiliki karakteristik cakupan spasial yang lebih luas namun tingkat akurasi lokal yang berbeda dibandingkan dengan pengukuran in-situ

- **Rencana Tindak Lanjut :**

- Penguatan Pengendalian Emisi Sumber Bergerak: Kerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) akan diintensifkan untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau kendaraan di luar mekanisme KIR yang selama ini belum termonitor.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Pengadaan alat uji emisi transportasi menjadi prioritas untuk meningkatkan akurasi pengawasan dan memperluas cakupan pemantauan emisi kendaraan bermotor.
- Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat: Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin sebagai upaya untuk menurunkan konsentrasi polutan di pusat kota pada hari-hari tertentu, sekaligus membangun kesadaran publik tentang pentingnya transportasi berkelanjutan.

3. Indeks kualitas lahan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Indeks kualitasLahan	Kalkulator			
	Indeks			
	Kualitas Lahan	56,73	46,90	82,67%

Analisis :

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar mencapai angka 46,90, yang setara dengan 82,67% dari target yang ditetapkan sebesar 56,73. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) masih berada pada jalur yang progresif, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. IKL, yang merupakan akumulasi dari luasan tutupan vegetasi pada RTH publik dan RTH privat, menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, mengingat RTH publik dikelola pemerintah untuk akses publik, sementara RTH privat mencakup lahan pekarangan, taman lingkungan, serta kawasan perkantoran dan komersial yang dikelola mandiri oleh masyarakat atau instansi. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Meskipun terdapat gap antara realisasi dan target, capaian sebesar 82,67% mengindikasikan adanya komitmen yang konsisten dalam pengelolaan RTH. Faktor pendorong utama keberhasilan ini adalah pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan RTH publik secara berkelanjutan. Keberadaan RTH publik yang dikelola langsung oleh pemerintah menjadi tulang punggung dalam menjaga stabilitas tutupan vegetasi, terutama vegetasi pohon keras yang menjadi objek penilaian dalam metode delineasi. Dengan kata lain, kontribusi signifikan dari sektor publik menjadi penopang utama IKL di tengah tantangan yang ada.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Perubahan Metode Penilaian : Penerapan metode delineasi dalam penilaian IKL membawa konsekuensi pada perubahan cara pengukuran dan interpretasi data. Metode ini menuntut ketelitian tinggi dalam mengidentifikasi dan memetakan pohon keras, sehingga hasil capaian menjadi lebih realistis namun juga lebih menantang dibandingkan metode sebelumnya.
 - Alih Fungsi Lahan : Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota, terjadi alih fungsi lahan yang cukup signifikan. Konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkotaan menyebabkan berkurangnya tutupan lahan, terutama yang sebelumnya ditumbuhi pohon keras. Hal ini menjadi tekanan

eksternal yang terus menggerus potensi peningkatan IKL, baik di lahan publik maupun privat.

- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Akurasi Data melalui Teknologi: Perhitungan IKL ke depan akan diupayakan menggunakan citra satelit. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan objektivitas dalam proses delineasi tutupan vegetasi, sekaligus mengatasi tantangan perubahan metode penilaian dengan pendekatan berbasis teknologi terkini.
 - Penguatan Vegetasi melalui Penanaman : Untuk mengatasi berkurangnya tutupan lahan akibat alih fungsi, pemerintah berupaya melaksanakan penanaman tanaman penghijauan secara masif. Fokus utama adalah pada penggunaan tanaman bertajuk lebar, yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan kanopi, menyerap karbon, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap nilai IKL dibandingkan vegetasi perdu atau semak.

4. **Persentase capaian layanan persampahan**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase capaian layanan persampahan	Jumlah volume sampah terolah ----- x 100% Jumlah total timbunan sampah	97,79	98,06	100,28%

Analisis :

Pada tahun 2025, realisasi capaian layanan persampahan menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu mencapai 98,06%, atau 100,28% dari target yang ditetapkan sebesar 97,79%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan persampahan di Kota Blitar tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui sasaran yang direncanakan. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

- 1. Pengolahan sampah di TPA = 22.918,35 ton/tahun
- 2. TPST 3R dan pengomposan = 3.171,12 ton/tahun
- 3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 188,07 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2025 sejumlah 28.796,68 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, pembinaan yang intensif kepada para pelaku pengelolaan sampah, seperti Bank Sampah, pemilah, dan penggiat pengurangan sampah, telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Kedua, penerapan sistem pengelolaan secara sanitary landfill di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) turut memastikan bahwa sampah yang terbuang dikelola dengan metode yang lebih terkontrol dan ramah lingkungan.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Meningkatnya jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan volume timbulan sampah yang cukup pesat, dengan total timbulan sampah tahun 2025 diperkirakan mencapai 28.796,68 ton/tahun dari tiga kecamatan. Kondisi ini menyebabkan daya tampung TPA semakin berkurang, mengancam keberlanjutan sistem pengelolaan sampah jangka panjang jika tidak diimbangi dengan strategi pengurangan volume secara signifikan.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif di TPA. Langkah ini bertujuan untuk memperpanjang umur pakai TPA dengan memaksimalkan ruang yang ada melalui pengelolaan yang lebih efisien.
 - Pembentukan Kampung Zero Waste. Program ini merupakan strategi jangka panjang untuk mendorong pengurangan sampah secara masif di tingkat komunitas, sejalan dengan target pemerintah untuk menggeser beban pengolahan dari TPA ke masyarakat.

2. **Kinerja Sasaran 1 :** Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau

Indikator :

5. **Persentase badan air yang memenuhi baku mutu**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah badan	91,67	77,78	84,85%

**air yang
ditetapkan****Analisis :**

Pada tahun 2025, realisasi persentase badan air yang memenuhi baku mutu air mencapai 77,78%. Capaian ini setara dengan 84,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 91,67%. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya, capaian ini menunjukkan adanya upaya serius dalam pengendalian pencemaran air. Dari hasil uji yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 kali, diperoleh data bahwa 7 dari 9 badan air telah memenuhi baku mutu. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lokasi pemantauan menunjukkan kondisi kualitas air yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini Pelaksanaan Uji Kualitas Air Secara Rutin: Kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala (2 kali dalam setahun di 18 titik) memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap fluktuasi kualitas air. Data yang diperoleh secara periodik ini menjadi basis penting dalam pengambilan keputusan dan intervensi dini. Serta Pembinaan Rutin kepada Pelaku Usaha : Upaya pembinaan yang konsisten kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah telah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan. Pendekatan preventif melalui pembinaan terbukti efektif dalam menekan potensi pelanggaran baku mutu sebelum terjadi pencemaran yang lebih luas.

- **Kendala yang Dihadapi :** Masih adanya beban pencemaran yang bersumber dari tiga sektor utama, yakni industri, peternakan, dan domestik. Limbah dari sektor-sektor tersebut menjadi penyebab utama penurunan kualitas air di beberapa titik, sehingga menghambat pencapaian target 91,67%.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Terpadu: Akan dilakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih intensif terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang terindikasi sebagai sumber pencemaran. Langkah ini bertujuan untuk menekan beban pencemaran dari sumber tidak bergerak (industri) dan sumber area (peternakan) melalui pendekatan persuasif sekaligus penegakan aturan.
 - Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Untuk mengatasi pencemaran dari sektor domestik yang kompleks, akan ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) selaku OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pengelolaan limbah domestik. Sinergi ini

diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik yang lebih terstruktur.

3. **Kinerja Sasaran 2** : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara

Indikator :

6. **Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	$\frac{\text{Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah kawasan yang ditetapkan}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%

Analisis :

Pada tahun 2025, realisasi Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara mencapai 100,00%, tepat sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kawasan strategis yang dipantau, meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan, dan transportasi, telah memenuhi standar baku mutu udara ambien. Keberhasilan ini diperoleh melalui uji kualitas udara ambien yang dilakukan di 4 lokasi dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 kali, di mana seluruh titik lokasi dinyatakan memenuhi baku mutu. Hasil uji tersebut selanjutnya diolah menggunakan kalkulator Indeks Kualitas Udara, yang mengonfirmasi bahwa kualitas udara di kawasan-kawasan tersebut berada pada level yang aman sesuai standar yang ditetapkan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tidak terlepas dari adanya berkontribusi signifikan, yaitu pelaksanaan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster. Langkah ini berperan penting dalam meningkatkan daya dukung lingkungan, menyerap polutan, serta menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi. Pendekatan klaster memungkinkan intervensi yang lebih terfokus dan efektif pada wilayah-wilayah prioritas.

- **Kendala yang Dihadapi :**

- Meskipun capaian indikator baku mutu udara menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat kendala mendasar yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan capaian ini ke depan. Kendala utama adalah belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan di luar pengujian berkala (KIR). Hal ini menjadi celah penting karena sektor transportasi merupakan salah satu sumber polusi udara dominan, terutama di wilayah perkotaan. Tanpa pengawasan yang komprehensif terhadap emisi kendaraan, terutama kendaraan pribadi dan angkutan umum yang tidak rutin diuji emisi, stabilitas kualitas udara berisiko mengalami penurunan.

• Rencana Tindak Lanjut :

- Kolaborasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan terhadap emisi kendaraan, tidak hanya terbatas pada kendaraan yang wajib KIR.
- Penguatan Infrastruktur: Melakukan pengadaan alat uji emisi transportasi guna mendukung kegiatan monitoring yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.
- Pengendalian Aktivitas Mobilitas: Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin sebagai upaya untuk menurunkan beban emisi dari sektor transportasi pada waktu dan lokasi tertentu, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya udara bersih.

4. Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH

Indikator :

7. Persentase RTH yang terkelola

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase RTH yang terkelola	Luas RTH yang terkelola ----- x 100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Luas RTH yang ditetapkan			

Analisis :

Pada tahun 2025, Kota Blitar berhasil mencapai realisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 100%. Capaian ini tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan (100%), tetapi juga menunjukkan konsistensi pengelolaan yang optimal atas seluruh aset RTH publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas RTH sebagai infrastruktur hijau vital bagi keberlanjutan lingkungan perkotaan. Faktor pendorong keberhasilan antara lain Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Dukungan fasilitas pendukung yang memadai di setiap titik RTH memungkinkan proses pengelolaan berjalan efektif dan efisien. Pemeliharaan Berkelanjutan: Adanya sistem pemeliharaan yang konsisten terhadap sarana, prasarana, dan tanaman di RTH menjadi kunci utama. Perawatan rutin memastikan fungsi ekologis, estetika, dan sosial RTH tetap terjaga sepanjang tahun. Pengelolaan Terpusat: Pengelolaan seluruh RTH publik yang terintegrasi di bawah satu kewenangan (Dinas Lingkungan Hidup) memberikan efektivitas dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan kinerja pengelolaan

- **Kendala yang Dihadapi** : Di balik capaian kuantitatif yang sempurna, terdapat tantangan kualitatif yang memerlukan perhatian serius. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya frekuensi permintaan pemotongan pohon besar dari berbagai pihak. Permasalahan ini menjadi signifikan karena tidak diimbangi dengan jumlah penanaman pohon pengganti yang proporsional. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini berpotensi mengurangi tutupan kanopi pohon dewasa yang memiliki peran krusial dalam menyerap karbon, menghasilkan oksigen, serta mengendalikan suhu mikro di wilayah perkotaan.
- **Rencana Tindak Lanjut** :
 - Optimalisasi Pemeliharaan: Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana, prasarana, dan tanaman eksisting. Strategi ini tidak hanya berfokus pada perawatan rutin, tetapi juga pada upaya preventif untuk meminimalkan potensi gangguan atau bahaya yang sering menjadi alasan permintaan pemotongan pohon.
 - Penanaman Terstruktur dengan Tepat : Melaksanakan program penanaman pohon secara berkala dengan mengedepankan tanaman yang memiliki tajuk lebar. Pendekatan ini diambil sebagai langkah kompensasi dan antisipatif terhadap potensi pengurangan pohon besar di masa mendatang. Penanaman pohon bertajuk lebar dipilih karena memiliki manfaat ekologis yang lebih tinggi, seperti naungan yang lebih luas, penyerapan air hujan yang lebih baik, serta kontribusi optimal terhadap penurunan emisi karbon.

5. Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan

Indikator :

9. Persentase sampah terkelola

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	98,00	98,06	100,06%

Analisis :

Tahun 2025 mencatatkan kinerja yang sangat signifikan dalam pengelolaan persampahan perkotaan. Realisasi layanan persampahan mencapai 98,06%, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,00% dengan tingkat pencapaian 100,06%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan persampahan telah berjalan di atas ekspektasi, menjangkau hampir seluruh wilayah perkotaan. Secara lebih rinci, persentase sampah yang tertangani (terlayani) berada pada angka 82,45%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah berhasil diangkut dan dikelola. Sementara itu, persentase sampah yang berkurang (melalui reduksi di sumber, daur ulang, atau pengelolaan lainnya) tercatat sebesar 15,61%. Meskipun masih relatif kecil dibandingkan dengan sampah yang tertangani, angka ini mencerminkan adanya upaya pengurangan yang mulai berjalan beriringan dengan upaya penanganan. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak terlepas dari dua faktor pendorong utama : Pembinaan Para Pelaku Pengelola Sampah: Intervensi aktif kepada pelaku utama seperti Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah telah berhasil membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pembinaan ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pengurangan sampah dari sumbernya serta memperkuat ekonomi sirkular di tingkat komunitas. Pengelolaan dengan Metode Sanitary Landfill: Penerapan sistem sanitary landfill yang lebih terkendali telah meningkatkan kapasitas dan kualitas penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Metode ini memungkinkan pengelolaan yang lebih aman secara lingkungan dibandingkan sistem open dumping, sehingga mendukung peningkatan layanan secara signifikan

- Kendala yang Dihadapi :

- Berkurangnya daya tampung TPA: Laju pertumbuhan sampah yang terus meningkat menyebabkan umur pakai TPA menjadi lebih pendek dari perencanaan awal.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Optimalisasi Pemanfaatan Cell 1 dan Penataan Lahan yang Lebih Efektif: Strategi ini difokuskan pada ekstensifikasi dan intensifikasi lahan eksisting di TPA. Dengan memaksimalkan pemanfaatan cell yang ada serta melakukan penataan lahan secara lebih efektif, daya tampung TPA dapat diperpanjang sambil menunggu solusi jangka panjang.
 - Pembentukan Kampung Zero Waste: Sebagai langkah antisipatif terhadap peningkatan timbulan sampah, pendekatan berbasis komunitas melalui Kampung Zero Waste menjadi strategi utama. Program ini bertujuan untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA melalui penguatan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara masif di tingkat kawasan, sekaligus mengurangi beban yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk.

6. Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Indikator :

9. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ----- x 100%	75,00%	75,56%	100,75%
limbah B3 yang terkelola dengan baik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang			

ditetapkan**Analisis :**

Pada tahun 2025, realisasi pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik tercatat sebesar 75,56%. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00%, tetapi juga melebihi ekspektasi dengan tingkat pencapaian target (100,75%). Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa sistem pembinaan dan pengawasan yang diterapkan mulai menunjukkan hasil yang optimal, serta mencerminkan komitmen kuat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar dalam meningkatkan kepatuhan sektor usaha terhadap regulasi pengelolaan limbah B3. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha. Pendekatan yang konsisten ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3, sekaligus membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Dengan adanya interaksi rutin antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, kepatuhan terhadap standar pengelolaan limbah dapat terus dipantau dan ditingkatkan secara bertahap.

- **Kendala yang Dihadapi :** Meskipun capaian secara kuantitatif melampaui target, masih terdapat kendala fundamental yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan laporan pemantauan di 45 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, tercatat 11 usaha (sekitar 24,44%) masih dalam kategori tidak taat. Kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 kepada DLH Kota Blitar. Rendahnya kepatuhan pelaporan ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah belum sepenuhnya menjadi budaya di kalangan pelaku usaha, sehingga berisiko terhadap potensi pencemaran lingkungan yang tidak terpantau.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Melakukan Sosialisasi : Sosialisasi intensif akan difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pelaporan pengelolaan limbah B3. Materi sosialisasi tidak hanya akan menyoroti aspek regulasi, tetapi juga manfaat ekonomi dan lingkungan dari pengelolaan limbah yang baik serta konsekuensi dari ketidakpatuhan.
 - Melakukan Pemantauan Rutin: Pemantauan yang telah berjalan akan diperkuat dengan pendekatan yang lebih terstruktur, khususnya yang menyoroti pelaku usaha untuk melakukan

pelaporan secara tepat waktu dan akurat. Pemantauan ini tidak bersifat represif semata, tetapi juga merupakan bentuk pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya secara mandiri.

7. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 (A)	85,81 (A)	97,51%

Analisis :

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 85,81, dari target nilai 88. Sehingga peroleh nilai SAKIP DLH 2025 tercapai sebesar 97,51%. Faktor pendorong dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ini adalah dukungan dari semua bidang dalam pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah di tetapkan.

- **Kendala yang Dihadapi** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2025, ditemukan berbagai kendala pada dokumen berikut ini :
 - Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi serta melakukan follow up atas saran yang telah diberikan.
 - Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan.
 - Meningkatkan kepedulian pegawai dalam penyajian informasi pada LKjIP dengan melaksanakan forum diskusi internal untuk membahas capaian kinerja, sehingga pegawai menyadari kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi.
 - Ke depan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk

memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Rencana Tindak Lanjut** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2025, maka didapatkan rencana tindak lanjut untuk penilaian tahun berikutnya sebagai berikut :

- Menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting di dalamnya.
- Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah.
- Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
- Memastikan data pembentuk indikator kinerja sudah terdokumentasi dengan baik dalam proses pengukuran kinerja.
- Menyusun Rancangan LKjIP 2025 yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- Bukti sosialisasi kepada seluruh unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja berupa :
 - Undangan rapat
 - Notulen rapat yang berisi antara lain realisasi pengukuran kinerja, pembahasan faktor pendorong, permasalahan/ penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ inovasi yang dilakukan untuk mencapai kinerja.
 - Dokumentasi kegiatan
- Bukti sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang informasi pada LKjIP berupa :
 - Undangan rapat
 - Notulen rapat yang berisi antara lain realisasi kinerja, pembahasan faktor pendorong, permasalahan/ penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ inovasi yang dilakukan untuk mencapai kinerja.
 - Dokumentasi kegiatan
- Bukti pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja :
 - Perubahan Renja
 - Perubahan PK 2025
 - Crosscutting antar bidang
 - Pohon Kinerja yang dilengkapi Crosscutting antar bidang

-
- Laporan Monev Renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 - 2025

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 - 2025

No.	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	61,72	67,78	67,78	67,78	56,11	70,86
		Indeks kualitas udara	85,48	86,43	87,38	85,83	89,79	75,10
		Indeks kualitas lahan	55,73	56,23	56,73	33,51	34,13	46,90
		Persentase capaian layanan persampahan	94	97,78	97,79	97,78	98,01	98,06
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	82,5	85,00	91,67	91,67	27,22	77,78
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	100,00	100	100	100,00	100
		Persentase RTH yang terkelola	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase sampah terkelola	94,99	97,78	98,00	97,78	98,01	98,06
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	72,5	75,00	75,00	73,81	75,01	75,56
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,00 (A)	87,00 (A)	88,00 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)	85,81 (A)

Berdasarkan data pada tabel, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang menggambarkan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, realisasi tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai, bahkan melampaui ekspektasi pada beberapa indikator, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek tertentu.

1. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas air melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 67,78 dibandingkan target 61,72. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air di wilayah tersebut. Demikian pula, indeks kualitas udara mencapai 86,43, melampaui target 85,4, yang mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran udara menunjukkan hasil positif. Indeks kualitas lahan juga berhasil melampaui target (56,23 dari target 55,73), mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Sampah dan Pemenuhan Baku Mutu

Capaian layanan persampahan sangat baik, dengan realisasi 97,78% melampaui target 94,9%, menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Persentase sampah terkelola juga mencapai

97,78%, melebihi target yang direncanakan. Selain itu, seluruh kawasan yang menjadi fokus pemantauan (industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) berhasil memenuhi baku mutu udara dengan capaian 100%, sesuai target. Persentase badan air yang memenuhi baku mutu juga tercapai dengan realisasi 85% dari target 82,5%, menandakan kualitas air permukaan terus membaik.

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Limbah B3

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menunjukkan kinerja sempurna dengan capaian 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, pengelolaan usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencapai 75%, melampaui target 72,5%, yang mencerminkan peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap penanganan limbah B3.

4. Kinerja SAKIP Perangkat Daerah

Dari sisi tata kelola pemerintahan, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah menunjukkan tren positif. Terdapat peningkatan dari 86,00 (A) menjadi 87,00 (A), yang mengindikasikan penguatan akuntabilitas kinerja. Namun, pada periode berikutnya terlihat nilai yang stabil di angka 85,21 (A), yang meskipun masih dalam kategori sangat baik (A), perlu menjadi perhatian untuk kembali ditingkatkan guna mempertahankan konsistensi kinerja.

Pembangunan Aloon-aloon Tahap 3 dan Pembangunan Outbond Gedog Tahap 2 merupakan sebuah pembangunan untuk mendukung misi ke-4 RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi s/d tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	65,32	70,86	108,48%
	Indeks kualitas udara	87,4	75,10	85,93%
	Indeks kualitas lahan	56,78	46,90	82,60%
	Persentase capaian layanan persampahan	98	98,06	100,06%
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	90	77,78	86,42%
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	100	100,00%
	Persentase RTH yang terkelola	100	100	100,00%
	Capaian layanan persampahan perkotaan	98	98,06	100,06%
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	80	75,56	94,45%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	85,81 (A)	96,42%

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL ATAU REALISASI KABUPATEN/KOTA

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
		Kota Blitar	Kota Surakarta	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	70,86	69,36	Melebihi
	Indeks kualitas udara	75,10	76,71	Kurang dari
	Indeks kualitas lahan	46,90	36,26	Melebihi
	Persentase capaian layanan persampahan	98,06	-	-
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	77,78	-	-
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	-	-
	Persentase RTH yang terkelola	100	-	-
	Capaian layanan persampahan perkotaan	98,06	-	-
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,56	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,81	-	-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	220.997.500,00	0,98%
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	212.533.600,00	0,94%
		Persentase RTH yang terkelola	3.662.708.759,33	16,25%
		Persentase sampah terkelola	11.641.567.648,00	51,66%
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	2.890.000,00	0,01%
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.794.184.845,67	30,15%
JUMLAH			22.534.882.353,00	100,00%

Total alokasi anggaran untuk 2 sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 adalah Rp 22.534.882.353,00 yang mana terbagi dalam 6 indikator sasaran. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase badan air yang memenuhi baku mutu memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 220.997.500,00** atau **0,98%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator sasaran selanjutnya adalah Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 212.533.600,00** atau **0,94%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator sasaran selanjutnya adalah Persentase RTH yang terkelola yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 3.662.708.759,33** atau **16,25%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator Sasaran selanjutnya adalah Persentase sampah terkelola yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 11.641.567.648,00** atau **51,66%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator Sasaran selanjutnya adalah Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 2.890.000,00** atau **0,01%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Dan indikator sasaran terakhir adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang memiliki nilai anggram sebesar **Rp 6.794.184.845,67** atau **30,15%** dari total anggaran yang telah teralokasi.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78	70,86	104,54%	220.997.500,00	217.513.750,00	98,42%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	91,67	77,78	84,85%	220.997.500,00	217.513.750,00	98,42%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	57	85,71	150,37%	172.700.000,00	169.870.000,00	98,36%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3	3	100,00%	172.700.000,00	169.870.000,00	98,36%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100,00%	172.700.000	169.870.000	98,36%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100,00%	2.600.000	2.476.250	95,24%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1	5	500,00%	2.600.000	2.476.250	95,24%
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1	5	500,00%	2.600.000	2.476.250	95,24%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65	68,29	105,06%	14.650.000	14.130.000	96,45%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60	56	93,33%	14.650.000	14.130.000	96,45%
Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomenda si dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12	19	158,33%	2.750.000	2.725.000	99,09%
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60	82	136,67%	11.900.000	11.405.000	95,84%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	100,00%	31.047.500	31.037.500	99,97%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1	1	100,00%	31.047.500	31.037.500	99,97%
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	100,00%	31.047.500	31.037.500	99,97%
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	87,38	75,10	85,95%	212.533.600,00	209.911.268,00	98,77%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	100	100,00%	212.533.600,00	209.911.268,00	98,77%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)	11,69	9,50%	81,27%	212.533.600,00	209.911.268,00	98,77%
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	100,00%			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18	4	22,22%	212.533.600,00	209.911.268,00	98,77%
	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3	3	100,00%			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	100,00%	212.533.600	209.911.268	98,77%
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lahan	56,73	46,90	82,67%	3.662.708.759,33	3.420.233.022,00	93,38%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase RTH yang terkelola	100	100	100,00%	3.662.708.759,33	3.420.233.022,00	93,38%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27	16,27	100,00%	3.662.708.759,33	3.420.233.022	93,38%
<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>	420,34	420,34	100,00%	3.662.708.759,33	3.420.233.022	93,38%
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	18	18	100,00%	3.662.708.759,33	3.420.233.022	93,38%
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase capaian layanan persampahan	97,79	98,06	100,28%	11.644.457.648,00	11.537.557.098,00	99,08%
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	75,00	75,56	100,75%			
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase sampah terkelola	98,00	98,06	100,06%	11.641.567.648,00	11.534.672.098,00	99,08%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,16	82,45	99,15%	11.039.128.048	10.972.523.559	99,40%
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,84	15,61	105,19%			

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang berkurang	22.950,27	23.743,03	103,45%	11.039.128.048	10.972.523.559	99,40%
	Volume sampah tertangani	3977,45	4.493,96	112,99%			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3	100,00%	326.829.913	309.659.727	94,75%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	23	27	117,39%	3.083.796.089	3.042.760.364	98,67%
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	2	200,00%	101.000.000	100.893.568	99,89%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90	90	100,00%	7.527.502.046	7.519.209.900	99,89%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	100,00%	296.475.400	274.944.348	92,74%
<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>100,00%</i>	<i>296.475.400</i>	<i>274.944.348</i>	<i>92,74%</i>
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	3	100,00%	63.390.100	62.767.000	99,02%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14	14	100,00%	233.085.300	212.177.348	91,03%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	28,4	33,33	117,36%	305.964.200	287.204.191	93,87%
	Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	0	0,00%			
	Persentase kelurahan berseri	53,97	87,3	161,76%			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	66	17	25,76%	305.964.200	287.204.191	93,87%
	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	20	3	15,00%			

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	100,00%	305.964.200	287.204.191	93,87%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00	75,56	100,75%	2.890.000,00	2.885.000,00	99,83%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	100,00%	2.890.000	2.885.000	99,83%
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	50	34	68,00%	2.890.000	2.885.000	99,83%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	100,00%	2.890.000	2.885.000	99,83%
Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00	85,81	97,51%	6.794.184.845,67	6.620.970.755,00	97,45%
Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00	85,81	97,51%	6.794.184.845,67	6.620.970.755,00	97,45%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	87,45	109,31%	6.794.184.845,67	6.620.970.755,00	97,45%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100,00%	2.850.000	2.850.000	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	11	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	100,00%	1.050.000	1.050.000	100,00%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100,00%	5.739.094.649	5.589.067.795	97,39%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	58	101,75%	5.737.169.649	5.587.160.295	97,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00%	1.925.000	1.907.500	99,09%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100,00%	54.088.700	53.968.200	99,78%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	0	0,00%	-	-	#DIV/0!

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69	57	82,61%	54.088.700	53.968.200	99,78%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100,00%	314.630.047	309.501.226	98,37%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	2.833.000	2.815.500	99,38%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00%	40.621.800	40.050.500	98,59%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	100,00%	4.641.500	4.598.500	99,07%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22	41	186,36%	100.595.000	99.680.000	99,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00%	12.491.300	12.356.500	98,92%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	27	75,00%	6.600.000	6.120.000	92,73%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	53	106,00%	146.847.446,67	143.880.226	97,98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	100,00%	43.637.950	41.807.901	95,81%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100,00%	43.637.950	41.807.901	95,81%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100,00%	352.139.500	347.943.068	98,81%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	24	66,67%	69.115.500	65.642.407	94,97%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	26	100,00%	283.024.000	282.300.661	99,74%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100,00%	287.744.000	275.832.565	95,86%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	3	7,69%	108.636.600	99.256.304	91,37%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	75	104,17%	54.167.300	53.935.000	99,57%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	102	127	124,51%	124.940.100	122.641.261	98,16%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kualitas air	104,54%	98,42%	1,06
Indeks kualitas udara	85,95%	98,77%	0,87
Indeks kualitas lahan	82,67%	93,38%	0,89
Persentase capaian layanan persampahan	100,28%	99,08%	1,01
Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	84,85%	98,42%	0,86
Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00%	98,77%	1,01
Persentase RTH yang terkelola	100,00%	93,38%	1,07
Persentase sampah terkelola	100,06%	99,08%	1,01
Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	100,75%	99,83%	1,01
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97,51%	97,45%	1,00

Keterangan :

≥ 1 : Efisien

< 1 : Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja utama dan sasaran strategis belum seluruhnya efisien. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi dibawah 1, sedangkan indikator kinerja yang lainnya memiliki tingkat efisiensi diatas 1. Karena semakin tinggi rasio efisiensi maka akan semakin efisien pula penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas air ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 104,54% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,42% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,87 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 85,95% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,77% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR; dan pada saat perhitungan target 2025, metode yang digunakan adalah menggunakan data empiris kota yang sudah memiliki alat AQMS, sementara capaian 2025 dihitung menggunakan data satelit atas wilayah kota

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas lahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,89 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 82,67% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,38% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi). Serta meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota

sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar karena perhitungan IKL menggunakan citra satelit.

Untuk pencapaian indikator Persentase capaian layanan persampahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,28% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,08% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana baik untuk penanganan dan pengurangan sampah.

Untuk pencapaian indikator Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,86 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 84,85% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,42% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Serta melakukan koordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.

Untuk pencapaian indikator Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,77% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

Untuk pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,10 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,38% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana serta tanaman di RTH.

Untuk pencapaian indikator Persentase sampah terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,06% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,08% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah); dan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*.

Untuk pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,75% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,83% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,00 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 97,45% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 97,51% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah 1)

Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi serta melakukan follow up atas saran yang telah diberikan. 2) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan. 3) Meningkatkan kepedulian pegawai dalam penyajian informasi pada LKjIP dengan melaksanakan forum diskusi internal untuk membahas capaian kinerja, sehingga pegawai menyadari kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi. 4) Ke depan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah 1) Menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya. 2) Menyusup SOP yang mengintegrasikan crosscutting di dalamnya. 3) Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah. 4) Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. 5) Memastikan data pembentuk indikator kinerja sudah terdokumentasi dengan baik dalam proses pengukuran kinerja. 6) Menyusun Rancangan LKjIP 2025 yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. 7) Bukti sosialisasi kepada seluruh unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja. 8) Bukti sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang informasi pada LKjIP. 9) Bukti pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas.

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2025 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah :

1. PROKLIM (PROGRAM KAMPUNG IKLIM)

TINGKAT NASIONAL :

- Proklam Kategori Lestari
 - RW 4 Kelurahan Klampok
- Proklam Kategori Utama
 - RW 11 Kelurahan Kepanjenkidul
 - RW 04 Kelurahan Tlumpu
 - RW 03 Kelurahan Gedog

2. ADIWIYATA (SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN)

TINGKAT NASIONAL :

- Adiwiyata Mandiri
 - SD Islam Tanjungsari Kota Blitar;
 - UPT SP SMPN 9 Kota Blitar;
 - UPT SP SMPN 4 Kota Blitar.
- Adiwiyata Nasional

- MIN Kota Blitar;
- UPT SP SMPN 3 Kota Blitar.

TINGKAT PROVINSI :

- Adiwiyata Provinsi
 - UPT SP SMPN 7 Kota Blitar;
 - UPT SP SDN 2 Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - UPT SP SDN 4 Sentul Kota Blitar;
 - UPT SP SDN 2 Kauman Kota Blitar.

3. KELURAHAN BERSERI (BERSIH, SEHAT, DAN LESTARI)

TINGKAT PROVINSI :

- Berseri Mandiri
 - Kelurahan Sananwetan
 - Kelurahan Tanggung
 - Kelurahan Ngadirejo

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2025 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun capaian dari masing-masing kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas air dari target 67,78 terealisasi 70,86, capaian sebesar 104,54%.
2. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas udara dari target 87,38 terealisasi 75,10, capaian sebesar 85,95%. Rendahnya capaian indeks kualitas udara ini dikarenakan pada saat perhitungan target 2025, metode yang digunakan adalah menggunakan data empiris kota yang sudah memiliki alat AQMS, sementara capaian 2025 dihitung menggunakan data satelit atas wilayah kota.
3. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lahan dari target 56,73 terealisasi 46,90, capaian sebesar 82,67%. Rendahnya capaian indeks kualitas lahan ini dikarenakan adanya perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi). Serta meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar.
4. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Persentase capaian layanan persampahan dari target 97,79% terealisasi 98,06%, capaian sebesar 100,28%.
5. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase badan air yang memenuhi baku mutu dari target 91,67% terealisasi 77,78%, capaian sebesar 84,85%. Rendahnya capaian Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ini dikarenakan terdapat Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari

sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

6. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) dari target 100,00% terealisasi 100,00%, capaian sebesar 100,00%.
7. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase RTH yang terkelola dari target 100,00% terealisasi 100,00%, capaian sebesar 100,00%.
8. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Capaian layanan persampahan perkotaan dari target 98,00% terealisasi 98,06%, capaian sebesar 100,06%.
9. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik dari target 75,00% terealisasi 75,56%, capaian sebesar 100,75%.
10. Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 88,00 (A) terealisasi 85,81 (A), capaian sebesar 97,51%. Walaupun belum memenuhi target, namun nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 telah melampaui nilai daripada tahun 2024 yaitu 85,05.

B Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan dalam LKJIP ini akan menjadi dasar perbaikan dokumen perencanaan tahunan dan menengah. Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :
 1. Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 2. Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.
- b. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :
 1. Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.
 2. Pengadaan alat uji emisi transportasi.
 3. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin.
- c. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :
 1. Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman

tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.

- d. Untuk meningkatkan capaian layanan persampahan, perlu dilakukan :
1. Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.
 2. Pembentukan kampung Zero Waste.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Dinas lingkungan hidup Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas lingkungan hidup Kota Blitar.

Blitar, 27 Februari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

MATRIKS RENSTRA 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
	Unsur Penunjang Urusan Lingkungan Hidup							
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	63,52			
	Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	persen	85,00			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%		56,00	1.289.000.000		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana pada tahun berjalan	aksi	3	1.289.000.000		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun berjalan	dokumen	1	1.289.000.000		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	persen	100,00	50.000.000		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kasus/aduan	1	50.000.000		
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pada tahun berjalan	pengaduan	1	50.000.000		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	persen	65,00	210.854.400		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup pada tahun berjalan	usaha	60	210.854.400		
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan pada tahun berjalan	dokumen	12	76.133.970		
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan	badan usaha	60	134.720.430		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	persen	100	200.000.000		
2.11.02.2.01	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
2.11.02.2.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
		Indeks kualitas udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	86,43			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	persen	100			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	persen	100	2.519.400.000		
		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	persen	8,95			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu pada tahun berjalan	titik	18	2.519.400.000		
		Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim pada tahun berjalan	kali	3			
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	1	2.519.400.000		
		Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	56,23			
		Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	persen	100			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	persen	16,27	9.789.000.000		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	Luas RTH Publik yang Terkelola pada tahun berjalan	ha	420,34	9.789.000.000		
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola pada tahun berjalan	unit	14	9.789.000.000		
		Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	persen	95,00			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
		Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbunan sampah dalam satu tahun) x 100%	persen	96,00			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbunan sampah) x 100%)	persen	83,15	19.710.598.000		
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbunan sampah) x 100%)	persen	12,85			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	Volume sampah tertangani pada tahun berjalan	ton	22.808,21	19.710.598.000		
		Volume sampah yang berkurang	Volume sampah yang berkurang pada tahun berjalan	ton	3.680,54			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada tahun berjalan	kelompok	3	1.000.000.000		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir pada tahun berjalan	unit	11	11.690.598.000		
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	dokumen	1	20.000.000		
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	(Luas jalan yang dilakukan penyapuan / Luas jalan di Kota Blitar) x 100%	persen	90	7.000.000.000		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	persen	100	600.000.000		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina pada tahun berjalan	kelompok	21	600.000.000		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	3	250.000.000		
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH pada tahun berjalan	lembaga	14	350.000.000		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	persen	50,79	467.073.700		
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	persen	26,21			
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	kali	1			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	18	467.073.700		
		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	61			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH pada tahun berjalan	entitas	5	467.073.700		
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	persen	72,00			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	Persen	75,00			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	persen	100	40.999.100		
2.11.05.2.0 2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan pada tahun berjalan	usaha dan/atau kegiatan	45	40.999.100		
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen	1	40.999.100		
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)			
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)			
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	nilai	79,5	8.231.229.966		
2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	persen	100	49.358.693		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	dokumen	11	10.810.800		
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	laporan	7	38.547.893		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100 \%$	persen	100	6.799.274.056		
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	orang	57	6.794.489.551		
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	4.784.505		
2.11.01.2.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	persen	100	176.907.010		
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	paket	3	79.910.000		
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	orang	69	96.997.010		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	<i>Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100%</i> <i>Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan</i>	persen	100	445.327.746		
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	6.292.329		
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	6	56.220.398		
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	4	7.090.950		
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	21	73.593.800		
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	27.684.029		
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokumen	36	8.448.000		
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat pada tahun berjalan Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	50	265.998.240		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	<i>Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 %</i> <i>Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan</i>	persen	100	69.509.308		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	6	15.806.519		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	7	53.702.789		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	0	0		
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	persen	100	363.877.966		
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	36	72.157.966		
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	26	291.720.000		
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	persen	100	326.975.187		
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	39	119.264.450		
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	69	6.072.000		
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	102	58.881.630		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2025			
					K	Rp		
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	100.000.000		
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	425	42.757.107		

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JAJUK INDIHARTATI**
Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

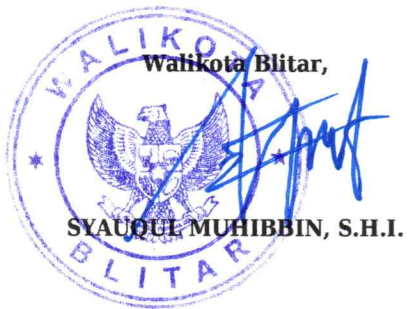

Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.


Blitar, 20 Oktober 2025
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar,**
Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196612311993032047

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	67.78(Indeks)
		Indeks Kualitas Udara	87.38(Indeks)
		Indeks Kualitas Lahan	56.73(Indeks)
		Persentase Capaian Layanan Persampahan	97.79(Persen)
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	91.67(Persen)
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100.00(%)
		Persentase RTH yang terkelola	100.00(%)
		Persentase sampah terkelola	98.00(Persen)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75.00(Persen)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11,039,128,048.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2,600,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	305,964,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	296,475,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14,650,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2,890,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,662,708,759.33	Dana Bagi Hasil (DBH)
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	385,233,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	31,047,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,794,184,845.67	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)
Total:		22,534,882,353.00	


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.


 Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar,
Ir. JAJUK INDIHARTATI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196612311993032047

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	57%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	172.700.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 pengaduan	2.600.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65%	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 dokumen	2.750.000,00
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	11.900.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	31.047.500,00
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	11,69%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	212.533.600,00
				Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%				
	Persentase RTH yang terkelola	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27%	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	18 unit	3.662.708.759,33
	Persentase sampah terkelola	97,78%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,16%	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok	326.829.913,00

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,84%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	23 unit	3.083.796.089,00
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	101.000.000,00
						Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 persen	7.527.502.046,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen	63.390.100,00
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 lembaga	233.085.300,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	53,97%	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	305.964.200,00
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	28,40%				
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali				
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	2.890.000,00
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 indeks	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	2.850.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	1.800.000,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/ bulan	5.737.169.649,00

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1.925.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	-
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 orang	54.088.700,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.833.000,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	40.621.800,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	4.641.500,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 paket	100.595.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12.491.300,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	6.600.000,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	146.847.446,67
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	43.637.950,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	69.115.500,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	283.024.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	108.636.600,00

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	54.167.300,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 unit	124.940.100,00

Mengetahui,
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**



Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

PENGUKURAN KINERJA KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Perangkat Daerah / Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2025		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2025		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah badan air yang ditetapkan	91,67	77,78	84,85%		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	172.700.000,00	169.870.000,00	98,36%	
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000	2.476.250	95,24%	
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000	14.130.000	96,45%	
								Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500	31.037.500	99,97%	
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah kawasan yang ditetapkan	100	100	100,00%		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	212.533.600,00	209.911.268,00	98,77%	
		Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	100	100	100,00%		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.662.708.759,33	3.420.233.022	93,38%	
		Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	98,00		0,00%		Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048	10.972.523.559	99,40%	
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	296.475.400	274.944.348	92,74%	
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	305.964.200	287.204.191	93,87%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2025		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2025		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ----- x 100% Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan	75,00	75,56	100,75%		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.890.000	2.885.000	99,83%	
6	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00	85,81	97,51%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.794.184.845,67	6.620.970.755,00	97,45%	

Mengetahui,



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR
Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047